

BAB II KAJIAN TEORI

A. Peningkatan Mutu Sekolah

1. Pengertian Mutu

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, mutu adalah “ukuran baik buruk suatu benda”. Menurut B. Suryobroto, mutu mengandung pengertian makna derajat (tingkat) keunggulan satu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa.¹³ Sedangkan Armai Arief, mendefinisikan mutu adalah “Usaha yang dilakukan oleh seseorang, lembaga (instansi) atau organisasi dalam upaya menyempurnakan suatu produk, agar produk itu bernilai fungsional dan efisien”.¹⁴ Jadi jelas bahwa mutu merupakan orientasi utama dari suatu produk, seberapa besar nilai suatu produk memenuhi kriteria atau standar yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

Mutu jika dilihat dalam konteks pendidikan yang dimaksud adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.¹⁵ Sesuatu dikatakan bermutu, pasti karena sesuatu itu bernilai baik atau mengandung makna yang baik. Sebaliknya sesuatu itu dikatakan tidak bermutu, bila sesuatu itu mempunyai nilai yang kurang baik, atau mengandung makna yang kurang baik.

Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu pendidikan identic dengan hasil keluaran (*output*) yang diproses secara maksimal oleh lembaga pendidikan. Sebab dari output inilah masyarakat bisa menilai apakah lembaga pendidikan tersebut bermutu atau tidak. Mutu dikatakan berkualitas apabila memiliki output yang berkualitas unggul dan mampu bersaing dengan yang lain.¹⁶ Jika performance suatu organisasi dapat memenuhi bahkan melebihi persyaratan stakeholder maka dapat dikatakan

¹³ Fathurrohman & Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), 42

¹⁴ Armai ARIEF, *Reformulasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: CRSD PRESS, 2005), Cet.1, 22)

¹⁵ Fathurrohman & Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), 45.

¹⁶ Aminatul Zahroh, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 27.

unggul. Jadi jelas bahwa mutu merupakan orientasi utama dari suatu produk, seberapa besar nilai suatu produk memenuhi kriteria. Standar atau rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

Jika ditarik kesimpulan, peneliti berpendapat bahwa mutu pendidikan adalah kegiatan pendidikan yang memenuhi standar kualifikasi baik pada input yang diproses dengan maksimal, sehingga terbentuk output yang unggul baik dalam kemampuan akademik berupa prestasi maupun non akademik.

2. Peningkatan Mutu

Salah satu hal yang sangat urgen bagi sekolah sampai ke perguruan tinggi adalah bagaimana menjadikan mutu pendidikan dapat terus meningkat dan berkembang supaya dapat bersaing dengan yang lainnya. Peningkatan mutu mempunyai pengertian suatu proses yang sistematis yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas sekolah dan factor-faktor yang berkaitan dengan kualitas sekolah, dengan tujuan agar target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.¹⁷ Menurut Edward Sallis mutu merupakan suatu ide yang dinamis.¹⁸ Dalam artian akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam upayanya menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan, sekolah juga menerapkan *Total Quality Manajemen* (TQM) untuk meningkatkan mutu secara terus-menerus. TQM dalam pendidikan merupakan perbaikan mutu secara terus menerus dimana lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan saat ini dan dimasa mendatang.¹⁹ TQM juga bertujuan memberikan kepuasan terhadap pelanggan seefisien mungkin.²⁰

TQM atau *Total Quality Management* (manajemen kualitas menyeluruh) merupakan strategi yang ditujukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada

¹⁷ Zamroni, *Meningkatkan Mutu Sekolah*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), 2

¹⁸ Edward Sallism Manajemen Mutu....hlm.15

¹⁹ Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori Model dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), 78-79.

²⁰ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendiidkan Konsep*, Strategi dan Aolikasi, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 23.

semua proses dalam organisasi. Suatu pendekatan manajemen di lembaga yang terfokus pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat.

Pada prinsipnya sistem manajemen ini adalah pengawasan menyeluruh dari seluruh anggota organisasi (warga madrasah) terhadap kegiatan madrasah. Penerapan Manajemen Mutu Terpadu berarti semua warga madrasah bertanggung jawab atas kualitas pendidikan.

Selain penerapan TQM, peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah merupakan manajemen yang tahu akan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di sekolah. Melalui MBS sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan kebutuhan sekolah.²¹ Manajemen Berbasis Sekolah sendiri merupakan upaya dalam memperbaiki mutu pendidikan yang ada di Indonesia dengan cara memberikan kewenangan dan tanggungjawab dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan para stakeholders dan masyarakat secara langsung.

Manajemen Berbasis Sekolah sebagai Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan; sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pelanggan. Sekolah sebagai institusi otonom diberikan peluang untuk mengelolah dalam proses koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.²²

Pada hakekatnya MBS merupakan penyeresain sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait langsung dengan sekolah dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah atau mencapai tujuan pendidikan nasional.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Isu-Isu Pendidikan di Indonesia: Lima isu Pendidikan Triwulan Kedua*, (Jakarta: Balitbang Diknas, 2004), 29.

²² Soebagio Admodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Ardadizyajaya, 2000), h. 5-6

Dengan mengacu pada strategi diatas misalnya manajemen berbasis sekolah lembaga pendidikan dapat menciptakan pelayanan program pendidikan sesuai potensi, tuntutan, dan kebutuhan siswa.

3. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam rangka merumuskan strategi pembangunan mutu lembaga pendidikan, setidaknya ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pendekatan tersebut antara lain, sebagai berikut:

1) Pendekatan Struktural

Dalam perpektif pendekatan structural, untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu perlu dibangun suatu sistem mutu yang inheren dalam struktur dan program lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun struktur dan mekanisme kerja yang jelas serta mengefektifkan seluruh unsur lembaga yang terjalin secara sistematis guna mendukung pencapaian tujuan yaitu mutu lembaga.²³

Pada pendekatan structural ini akan memberikan kejelasan fungsi penerapan kegiatan kerja seorang individu atau kelompok pegawai secara organisasional. Terdapat informasi tertulis yang menguraikan tugas-tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan serta digunakan untuk mengetahui bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Inti dalam pendekatan structural ini adalah bagaimana cara membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis.

Implementasi dari pendekatan ini adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan sumberdaya organisasi yang dilaksanakan secara berkualitas sejak dari proses perencanaan hingga tahap evaluasi.

2) Pendekatan Kultural.

Lembaga pendidikan dalam proses perjalanannya akan mengalami dinamika dan melahirkan pola-pola (fikir sikap dan tindak) yang khas.

²³ Fathurrohman & Sulistyorini, 78.

Dalam perspektif TQM, pembangunan mutu membutuhkan perubahan budaya ke arah budaya mutu. Esensinya adalah pembentukan budaya mutu, dimana gagasan tentang kualitas harus selalu ada di tiap organisasi. Inilah yang kemudian akan membentuk sebuah budaya organisasi.²⁴

Implementasi dari pendekatan ini adalah disusunnya sebuah “program” yang disebut sebagai program pembudayaan mutu (*Culturizing of Quality*). Nilai-nilai mutu perlu diintrodusir dan disosialisasikan kepada seluruh elemen organisasi untuk kemudian dijadikan sebagai standar perilaku yang dilaksanakan dalam melaksanakan seluruh proses yang berlangsung dalam lembaga pendidikan.

Baik pendekatan structural maupun kultural, kedua merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen organisasi terlibat dalam upaya pembangunan mutu. Sehingga jika kedua pendekatan ini bisa berjalan dengan baik, maka seluruh komponen organisasi secara terpadu berupaya mencapai mutu.

4. Penilaian Mutu

Agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya titik acuan standar).

Penjaminan mutu pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Penjaminan mutu, dalam peraturan tersebut, didefinisikan kegiatan yang sistemik dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Kegiatan yang sistemik terpadu tersebut dilakukan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, masyarakat, serta melibatkan dunia usaha. Penyelenggara satuan program pendidikan berkewajiban menyediakan dan memberikan bantuan dalam pemenuhan standar. Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, melakukan pengawasan, evaluasi,

²⁴ Fathurrohman & Sulistyorini, 80.

fasilitasi, memberikan saran arahan dan/atau bimbingan kepada satuan/program pendidikan.²⁵

Standar adalah ukuran atau barometer yang digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu hal. Menurut peraturan pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 setiap jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan oleh Badan standar Nasional Pendidikan (BSNP). Delapan hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, antara lain:

- 1) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 2) Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 3) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria pendidik prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- 4) Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 5) Standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- 6) Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan.

²⁵ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu* (Bandung; Refika Aditama, 2016), 7.

- 7) Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.
- 8) Standar kompetensi kelulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan.²⁶

Konsep dasar penjaminan mutu sekolah sesuai Permendiknas nomor 63 tahun 2009 terdiri atas Standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berbasis keunggulan lokal. Artinya apabila sebuah sekolah telah melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) dikatakan sekolah yang bermutu yang disebut dengan sekolah mandiri.

B. Gerakan Literasi Sekolah

1. Pengertian Literasi

Literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya.²⁷ Kern berpendapat literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis yang juga berkaitan dengan pembiasaan dalam membaca dan mengapresiasi karya sastra serta melakukan penilaian terhadapnya.²⁸ Jadi istilah literasi dapat diartikan sebagai kemampuan individu mengolah dan memahami informasi saat membaca atau menulis maupun melihat, menyimak dan/atau berdialog dengan orang-orang.

Hal ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain dan untuk membuat makna. Atau bisa dikatakan literasi berfungsi untuk menghubungkan individu dan masyarakat serta merupakan alat penting bagi individu untuk tumbuh dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Bagi PIRLS, literasi membaca digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa tulis yang diperlukan oleh masyarakat

²⁶ Ridwan Abdullah Sani dkk, *Penjaminan Mutu Sekolah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 15.

²⁷ Esti Swatika Sari dan Setyawan Pujiono. "Budaya Literasi Di Kalangan Mahasiswa Fbs Uny" *Jurnal Litera*, Volume 16, No. 1, (2017), 106.

²⁸ Bahrul Hayat, Suhendra Yusuf, *Benchmark Internasional Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 25.

atau individu. Pembaca dapat membangun makna dari berbagai teks. Mereka membaca untuk belajar, untuk mengambil bagian dalam masyarakat pembaca di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk kesenangan.²⁹ Dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah (GLS), membaca adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara.

Peneliti memahami pengertian literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis, namun juga mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada, baik dalam bentuk cetak, visual dan auditori. Kemampuan literasi diperoleh melalui berbagai aktivitas seperti membaca, melihat, menulis, menyimak, dan/atau berbicara. Budaya literasi dapat dibangun melalui berbagai kegiatan pembiasaan membaca dan menulis. Berbagai cara membangun budaya literasi dapat dilakukan di sekolah yaitu melalui program Gerakan Literasi Sekolah (GLS).

Dalam konteks literasi sekolah, membaca dan menulis merupakan dua hal yang penting yang menjadi focus utama dari gerakan ini. Dengan membaca, manusia dapat memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan. Farr menyebutkan bahwa "*Reading is the heart of education*".³⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa membaca adalah inti dari pendidikan. Bukan hanya itu, membaca merupakan kunci untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan, termasuk informasi dan petunjuk sehari-hari yang berdampak besar bagi kehidupan.

Membaca merupakan salah satu kemampuan dalam bahasa pokok yang merupakan bagian dari komunikasi tulisan sehingga pesan dapat disampaikan oleh penulis kepada pembacanya.³¹ Pada hakekatnya, membaca melibatkan banyak hal, tidak sekedar melafalkan tulisan, namun juga melibatkan aktivitas visual,berpikir,psikolinguistik, dan metakognitif.³²

²⁹ Ibid, 58.

³⁰ Dalman, *Keterampilan menulis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 5.

³¹ Soedarso, *Speed Reading*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) 4.

³² Farida Rahim, *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2.

Membaca dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami berbagai konsep dengan mudah.

Membaca juga sangat penting dalam “*self-realization, helping children learn about themselves and their potential*” membaca membuat siswa lebih berpengetahuan, tidak hanya tentang mata pelajaran di sekolah tetapi juga tentang topik-topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan masyarakat secara umum.³³ Selain itu, membaca juga meningkatkan kosakata seseorang, perintah pada bahasa, dan kemampuan komunikasi. Seseorang yang membaca mampu berkonsentrasi pada pelajaran mereka dan lebih baik daripada mereka yang tidak.³⁴ Kemampuan membaca secara langsung berhubungan dengan kemampuan menulis yang baik, sebab orang yang jarang membaca akan mengalami kesulitan dalam menemukan kosakata ketika menulis.

Sedangkan menulis adalah manifestasi dari hasil apa yang kita baca, kita fahami dan kita alami. Menulis dapat mengasah kreativitas, melatih dalam mengolah kata menjadi kalimat dan paragraf, mengkonstruksi fikiran kita untuk berfikir sistematis dan terarah, serta dapat mengembangkan diri untuk berkarya dalam bentuk tulisan.

Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau unsur medianya.³⁵

Gerakan masyarakat membaca dan menulis merupakan gerakan yang menjadi satu kesatuan. Membaca dan menulis kedua literasi ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang tidak dapat dibuang salah satu. Dengan literasi membaca dan menulis akan mendorong masyarakat selalu mengikuti perkembangan informasi.

Saat ini tradisi membaca dan menulis harus terus dikembangkan mengingat bahwa melalui membaca, maka kemajuan pendidikan akan lebih pesat. Kemudian melalui kegiatan menulis, ide, gagasan, serta ilmu

³³ Tadkiroatun Musfroh dan Beniati Listyorini, “Konstruksi Kompetensi Literasi Untuk Siswa Sekolah Dasar, *LITERA*, Volume 15, Nomor 1, April 2016 “5

³⁴ I Made Ngurah Suragangga, Mendidik Lewat Literasi Untuk Pendidikan Berkualitas, *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol.3 No. 2 Agustus 2017, 155.

³⁵ Dalman, *Keterampilan menulis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 3.

pengetahuan akan terus berkembang. Melalui tulisan ide dan gagasan, akan lebih dikenang sepanjang masa, karena seseorang bisa dikenal abadi lewat tulisannya.

2. Pengertian Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Disebutkan dalam panduan Gerakan Literasi Nasional (GLN), bahwasannya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan gerakan literasi yang aktvitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta orang tua.³⁶ Gerakan Literasi Sekolah dilakukan dengan menampilkan praktik baik tentang literasi dan menjadikannya sebagai kebiasaan serta budaya di lingkungan sekolah. Literasi juga dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari semua rangkaian kegiatan siswa dan pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas.

Gerakan Literasi Sekolah merupakan salah satu program Kemendikbud RI. Program ini dicetuskan oleh mantan Mendikbud RI Anies Baswedan. Program ini lahir untuk memperkuat Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang salah satunya adalah upaya penumbuhan budaya literasi pada siswa dengan kegiatan membaca buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.

GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.³⁷ Agar lebih masif, program GLS melibatkan partisipasi publik, seperti pegiat literasi, orang tua, tokoh masyarakat, dan profesional.

Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah merupakan perwujudan dari Nawacita (9 harapan) yang tertuang pada butir nomor 5, 6, 8 dan 9 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud.. Butir Nawacita yang dimaksud adalah: 5). meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, 6). meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

³⁶ Panduan Gerakan Literasi Nasioanal, 19

³⁷ Pangesti Wiedarti, "*Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*", (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), h.7

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 8). melakukan revolusi karakter bangsa; 9). memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Keempat poin dari Nawacita di atas merupakan komponen dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang unggul di antara bangsa lain di dunia ini.

Jadi, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan suatu kegiatan literasi yang berada lingkungan sekolah. Dimana usaha ini, diharapkan nantinya dapat mendorong seluruh anak Indonesia agar memiliki minat membaca buku yang menjadi budaya dalam kehidupan nasional. Pada hakikatnya, program Gerakan Literasi Sekolah ini merupakan upaya mewujudkan bangsa Indonesia yang unggul.

3. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah

Berdasarkan buku panduan yang dibuat oleh Kemendikbud terkait kebijakan ini, Gerakan Literasi Sekolah mempunyai dua tujuan yaitu:

a. Tujuan Umum

Menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Menumbuh kembangkan budaya literasi di Sekolah
- 2) Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat
- 3) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan.
- 4) Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.³⁸

Jadi gerakan literasi sekolah mempunyai tujuan untuk mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat, yakni menjadikan warganya berbudaya membaca dan menulis sejak dini (berbudaya literasi).

³⁸ Ibid, 5.

4. Ruang lingkup Gerakan Literasi Sekolah

- a. Lingkungan fisik sekolah (fasilitas dan sarana prasarana literasi),
- b. Lingkungan sosial dan afektif (dukungan dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah), dan
- c. Lingkungan akademik (program literasi yang menumbuhkan minat baca dan menunjang kegiatan pembelajaran di Sekolah).

5. Landasan Filosof dan Landasan Hukum

a. Landasan Filosof

Sumpah Pemuda butir ketiga (3) menyatakan, “menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia yang memiliki makna pengakuan terhadap keberadaan ratusan bahasa daerah yang memiliki hak hidup dan peluang penggunaan bahasa asing sesuai dengan kebutuhannya.”

- 1) Butir ini menegaskan pentingnya pembelajaran berbahasa dalam pendidikan nasional.
- 2) Konvensi PBB tentang Hak Anak pada tahun 1989 tentang pentingnya penggunaan bahasa ibu. Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa, khususnya mikrokultur-mikrokultur tertentu perlu difasilitasi dengan bahasa ibu saat mereka memasuki pendidikan dasar kelas rendah (kelas I, II, III).
- 3) Konvensi PBB di Praha tahun 2003 tentang kecakapan literasi dasar dan kecakapan perpustakaan yang efektif merupakan kunci bagi masyarakat yang literat dalam menghadapi derasnya arus informasi teknologi. Lima komponen yang esensial dari literasi informasi itu adalah basic literacy, library literacy, media literacy, technology literacy, dan visual literacy.

b. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 3: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- 10) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019.³⁹

6. Strategi Menumbuhkan Budaya Literasi

- 1) Penguatan Kapasitas Fasilitator
 - a. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan literasi pada pembelajaran;
 - b. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam pembuatan mainan edukatif berbasis literasi
 - c. Forum diskusi bagi warga sekolah untuk mengembangkan kegiatan literasi dan meningkatkan kemampuan berliterasi.
- 2) Penigkatan Jumlah dan Ragam Sumber Bacaan Bermutu

³⁹ Pangesti Wiedarti, "*Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*", (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), h.4.

- a. Penyediaan bahan bacaan nonpelajaran yang beragam;
 - b. Penyediaan alat peraga dan mainan edukatif yang mendukung kegiatan literasi;
 - c. Penyediaan bahan belajar literasi dalam bentuk digital;
 - d. Program menulis buku bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
- 3) Perluasan Akses terhadap Sumber Belajar dan Cakupan Peserta Belajar
- a. Pengembangan sarana penunjang yang membentuk ekosistem kaya literasi;
 - b. Penyediaan laboratorium yang berkaitan dengan literasi, misalnya, laboratorium bahasa, sains, finansial, dan digital;
 - c. Penyediaan pojok baca, baik di tap kelas maupun ditempat-tempat strategis di sekolah;
 - d. Pengoptimalan perpustakaan sekolah;
 - e. Penyelenggaraan *open house* oleh sekolah yang sudah mengembangkan literasi
 - f. Program pengimbasan sekolah;
 - g. Pelaksanaan kampanye literasi.
- 4) Peningkatan Pelibatan Publik
- a. Pelaksanaan sesi diskusi dengan tokoh atau pegiat berbagai bidang literasi mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka terkait dengan bidang yang mereka kuasai;
 - b. Pelaksanaan festival atau bulan literasi yang melibatkan pakar, pegiat literasi, dan masyarakat umum;
 - c. Pelibatan BUMN dan DUDI dalam pengadaan bahan bacaan dan kegiatan literasi di sekolah.
- 5) Penguatan Tata Kelola
- a. Pengalokasian waktu atau jadwal khusus untuk melakukan berbagai kegiatan literasi di sekolah;
 - b. Pengalokasian anggaran untuk mendukung literasi di sekolah;
 - c. Pembentukan tim literasi sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, pengawas, guru, dan wakil orang tua peserta didik dengan tugas memantau berjalannya kegiatan-kegiatan literasi di sekolah;

- d. Pembuatan kebijakan yang mengatur kegiatan literasi di sekolah sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan semua warga sekolah
- e. Penguatan peran komite sekolah untuk membangun relasi kerja sama dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan literasi.⁴⁰

Lima aspek strategi dalam meningkatkan literasi siswa diatas, merupakan usaha dalam menjadikan literasi sebagai kebiasaan dan budaya dilingkungan sekolah sehingga literasi nantinya tidak dapat dipisahkan dari dari semua rangkaian kegiatan siswa dan pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas. Adapun strategi diatas, juga perlu ditunjang dengan berbagai perencanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

f. **Perencanaan Program Literasi Sekolah**

Kesuksesan program literasi sekolah tidak lepas dari perencanaan yang baik. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan.⁴¹ Perencanaan merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematis disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja.⁴²

Jadi perencanaan merupakan proses penentuan sasaran yang akan dikerjakan dalam program pendidikan dan sudah dirangkum dalam kumpulan kebijakan yang sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan.

Proses perencanaan di sekolah harus dilaksanakan secara kolaboratif, artinya dengan mengikutsertakan personel sekolah dalam semua tahap perencanaan itu. Pengikutsertaan ini akan menimbulkan perasaan ikut memiliki (*sense of belonging*) yang dapat memberikan dorongan kepada guru dan personel sekolah yang lain untuk berusaha agar rencana tersebut berhasil.⁴³

⁴⁰ Ibi, 14-17.

⁴¹ Nanang Fattah, *landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 49.

⁴² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 20014), 20

⁴³ B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16

Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya, perencanaan itu dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.⁴⁴ Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan, identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.⁴⁵ Fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan dengan menentukan strategi, kebijakan, taktik, dan program.⁴⁶

Proses dalam membuat perencanaan dalam bidang pendidikan perlu memerhatikan beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat perencanaan yang dikenal dengan 5W dan H (what, why, where, when, who and how). Pertanyaan diatas harus dijawab secara ilmiah melalui proses analisis data, informasi, dan fakta, agar perencanaan yang dibuat bisa tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁴⁷

Wiedarti mengemukakan ada beberapa rancangan program Literasi yang harus dilakukan dalam satuan Pendidikan, diantaranya:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal.
- 2) Melaksanakan tahapan kegiatan GLS yang meliputi pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran.
- 3) Melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
- 4) Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran.

⁴⁴ Ibid 22.

⁴⁵ Nanang Fattah, *landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 49.

⁴⁶ *Ibid.*, 2.

⁴⁷ Mutohar, "*Manajemen Mutu Sekolah*", (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), H.141.

- 5) Mengelola perpustakaan sekolah dengan baik.
- 6) Menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku).
- 7) Menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah.
- 8) Melaksanakan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran bagi seluruh warga sekolah.
- 9) Mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.
- 10) TLS mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLS.
- 11) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat.
- 12) Merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan GLS.
- 13) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS yang dilaksanakan.
- 14) Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.

Selain itu, perencanaan dan penganggaran yang baik juga harus berdasarkan analisis kebutuhan.⁴⁸ Selain perencanaan yang telah dikemukakan dalam panduan gerakan literasi di sekolah dasar, perencanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) tidak terlepas dari Manajemen Berbasis Sekolah. Dimana (GLS) nantinya akan melibatkan peran serta anggota sekolah serta masyarakat dan manajemen sekolah dalam merencanakan Gerakan Literasi Sekolah.

g. Tahapan Pelaksanaan (*Actuating*) Gerakan Literasi Sekolah

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Rencana yang sudah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan

⁴⁸ Pangesti Wiedarti, “*Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), h.31.

dengan efektif dan efisien.⁴⁹ *Actuating*, artinya menggerakkan dan mengusahakan agar para pendidik melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya. Dalam *actuating* terdapat hal-hal berikut.⁵⁰

- 1) Penetapan memulai pelaksanaan rencana kerja pendidikan
- 2) Pemberian contoh atau simulasi pelaksanaan kerja dari kepala sekolah
- 3) Pemberian motivasi para pendidik untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
- 4) Pengkomunikasian seluruh arah pekerjaan dengan semua unit kerja
- 5) Peningkatan mutu dan kualitas kerja pendidik
- 6) Pengawasan kinerja dan moralitas pendidik

Wiedarti mengungkapkan bahwa tahapan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah ini terbagi dalam tiga tahapan. Ketiga tahapan tersebut adalah:

- a. Tahap ke-1: Pembiasaan. Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca adalah membiasakan warga sekolah membaca buku selama 15 menit setiap hari. Kegiatan 15 menit membaca dapat dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai atau pada waktu lain yang memungkinkan. Kegiatan yang bertujuan menumbuhkan minat terhadap bacaan ini dilaksanakan tanpa tagihan sampai minat membaca warga sekolah tumbuh, berkembang, dan sampai pada tahap gemar/cinta membaca.
- b. Tahap ke-2: Pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi. Kegiatan literasi pada fase ini bertujuan

⁴⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 21

⁵⁰ Hasan Basri dan Tatang S., *Kepemimpinan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 187.

mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan Pengembangan minat baca yang berdasarkan pada kegiatan membaca 15 menit setiap hari ini mengembangkan kecakapan literasi melalui kegiatan nonakademis (tagihan nonakademis yang tidak terkait dengan nilai dapat dilakukan). Contoh: menulis sinopsis, berdiskusi mengenai buku yang telah dibaca, kegiatan ekstrakurikuler, dan kunjungan wajib ke perpustakaan (jam literasi).

- c. Tahap ke-3: Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan literasi pada fase pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku pengayaan dan buku pelajaran. Dalam hal ini tagihan yang bersifat akademis (terkait dengan mata pelajaran) dapat dilakukan. Guru menggunakan strategi literasi dalam melaksanakan pembelajaran (dalam semua mata pelajaran). Pelaksanaan strategi literasi didukung dengan penggunaan pengatur grafis. Selain itu, semua mata pelajaran sebaiknya menggunakan ragam teks (cetak/visual/digital) yang tersedia dalam buku-buku pengayaan atau informasi lain di luar buku pelajaran. Guru diharapkan bersikap kreatif dan proaktif mencari referensi pembelajaran yang relevan.

Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi ini mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku nonteks pelajaran yang dapat berupa buku tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak enam buku bagi siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP, dan 18 buku bagi siswa SMA/SMK. Buku laporan kegiatan membaca ini disediakan oleh wali kelas. Judul dan jumlah buku yang telah dibaca dijadikan

bahan pertimbangan pada saat kenaikan kelas atau kelulusan jenjang tertentu.⁵¹

h. **Monitoring dan Evaluasi**

Evaluasi sebagai fungsi manajemen merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi untuk mencapai hasil sesuai rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.⁵² Evaluasi sebaiknya dikerjakan setiap hari dengan skedul yang sistematis dan terencana. Ini dapat dilakukan oleh seorang guru dengan menempatkan secara integral evaluasi dalam perencanaan dan implementasi satuan pelajaran materi pembelajaran. Bagian penting lainnya yang perlu diperhatikan bagi seorang pendidik adalah perlunya melibatkan siswa dalam evaluasi sehingga mereka secara sadar dapat mengenali perkembangan pencapaian hasil pembelajaran mereka. Kegiatan evaluasi dapat mencakup deskripsi tingkah laku, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.⁵³

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan literasi pada tiap jenjang pendidikan. Dalam mengukur mutu sekolah, satuan Pendidikan juga melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan jangkauan sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan indikator SPM Dikdas dan efektivitas upaya pemenuhannya terutama ketersediaan 10 judul buku referensi dan 100 judul buku pengayaan dan prasarana lain, serta pengelolaan dan pemanfaatannya;
- 2) keefektifan pelaksanaan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan

⁵¹ Pangesti Wiedarti, *“Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah”*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h.29-30.

⁵² Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 40

⁵³ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2-3

- pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
- 3) keefektifan dan dampak pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
 - 4) keefektifan dan dampak pengelolaan perpustakaan sekolah dengan baik terhadap pembelajaran dan kemampuan literasi warga sekolah;
 - 5) keefektifan dan dampak pelaksanaan inventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku) terhadap pelayanan sekolah;
 - 6) keefektifan dan dampak adanya ruang-ruang baca terhadap kemampuan literasi warga sekolah dan budaya sekolah;
 - 7) keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran terhadap minat dan budaya baca warga sekolah;
 - 8) keefektifan dan dampak pembentukan TLS dalam pelaksanaan berbagai kegiatan GLS yang dilaksanakan sekolah;
 - 9) keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat dengan melihat tindakan yang diberikan kepada peserta didik oleh orang tua dan masyarakat untuk menindaklanjuti perlakuan yang diterima peserta didik di sekolah
 - 10) keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan pihak lain terhadap kemampuan literasi warga sekolah.⁵⁴

⁵⁴ Pangesti Wiedarti, h. 41.